

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN IDEOLOGI
PANCASILA PADA ORGANISASI MASYARAKAT
DI INDONESIA**

SKRIPSI



**Oleh
Erwin
150710056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN IDEOLOGI
PANCASILA PADA ORGANISASI MASYARAKAT
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana



Oleh
Erwin
150710056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

TAHUN 2019
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin
NPM : 150710056
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia”

Adalah hasil karya penulis sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis kutipan dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dari daftar pustaka.

Apabila dalam skripsi ini dibuktikan terhadap unsur-unsur plagiat, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Batam, 6 Pebruari 2019
Yang menyatakan,

Erwin
150710056

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN IDEOLOGI
PANCASILA PADA ORGANISASI MASYARAKAT
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh

Erwin

150710056

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 6 Pebruari 2019

Drs. Ukas. S.H., M.Hum.

Pembimbing

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan landasan fundamental dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sesuai Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah di Amandemen membuka ruang konsekuensi pada prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan Undang Undang dan demokrasi terwakilkan oleh kedaulatan rakyat, artinya demokrasi memegang peranan penting dalam proses berbangsa dan bernegara. Wujud dari sistem demokrasi adalah berkembangnya organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia yang merujuk ke hak berserikat, hak berkumpul, dan hak mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Permasalahan beberapa organisasi kemasyarakatan yang diduga menyimpang dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian pemahaman dan peranan ideologi Pancasila pada organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang kian menurun dalam keberlangsungannya, hal tersebut disebabkan oleh faktor globalisasi teknologi sehingga masuknya paham-paham ekstrim dari luar negeri dan beberapa faktor lainnya. Penyelenggara Negara menerbitkan Perppu yang kemudian sah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Undang Undang tersebut dinilai lebih efektif dalam dalam penertiban terhadap ormas-ormas yang sedang berlangsung di Indonesia, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berfungsi dalam hal mengawasi, membina, dan merekomendasikan perkembangan seluruh ormas yang sedang berlangsung di Indonesia. Artinya, sebagai masyarakat Indonesia yang pluraristik dalam menjalankan hak-hak sebagai warga Negara juga wajib memperhatikan hak-hak orang lain dan peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kemudian sebagai saran kepada pemerintah untuk mengadakan kembali kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada setiap jenjang pendidikan formal dengan tujuan pemahaman-pemahaman ideologi Pancasila telah tertanam sejak usia dini pada seluruh generasi Bangsa Indonesia, dan pemerintah lebih tegas dalam hal menyeleksi konten-konten pada internet yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia

Kata kunci : Pancasila; ideologi; bangsa dan Negara.

ABSTRACT

Pancasila is the basis of the Indonesian State and the view of the Indonesian people. As the basis of the State, Pancasila is used as a fundamental foundation and is the source of all sources of law in Indonesia. In accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Amendment has opened up a space of consequences whose principle, namely Democracy and Law. Law is represented by law and democracy is represented by popular sovereignty, meaning that democracy plays an important role in the process of Nation and State. The manifestation of a democratic system is the development of community organizations (mass organizations) in Indonesia that refer to the right to associate, the right to gather, and the right to issue opinions protected by the constitution. The problems of several social organizations that are suspected of being deviant and contrary to the Pancasila ideology. The author uses normative juridical research methods in the research of the understanding and role of the Pancasila ideology in social organizations in Indonesia which is declining in its sustainability, this is due to the globalization of technology so that the entry of extreme ideas from abroad and several other factors. The State Organizer issues the Perppu which then legally becomes Law Number 2 of 2017 on Community Organizations with the aim of curbing a number of community organizations in Indonesia. The law was considered more effective in controlling the ongoing mass organizations in Indonesia, then the government issued Presidential Regulation (Perpres) Number 7 of 2018 on concerning the Pancasila Ideology Development Agency which functions in overseeing, fostering, and recommending the development of all ongoing organizations in Indonesia. That is, as a pluralistic Indonesian society in exercising its rights as citizens, it is also obligatory to pay attention to the rights of others and legislation in accordance with the ideology of the Pancasila and the 1945 Constitution. Then as a suggestion to the government to re-establish the Pancasila Moral Education curriculum (PMP) at every level of formal education with the aim of understanding Pancasila ideologies that have been embedded from an early age in all generations of the Indonesian Nation, and the government is more assertive in selecting content on the internet which is not in accordance with Indonesian culture

Keywords: Pancasila; ideology; Nation and State.

KATA PENGANTAR

Dengan kasih dan sayangnya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan segala kemudahan hingga pada saat ini masih diberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan penulis terima dan dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom. M.Si, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. Selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak

berkontribusi dalam hal arahan dan bimbingan, juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Filsafat Hukum dan merupakan inspirator ilmu Filsafat Pancasila selama penulis kuliah.
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perdata selama penulis kuliah.
8. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Tindak Pidana Korupsi dan merupakan inspirator dalam penulisan skripsi selama penulis kuliah.
9. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran ilmu Hukum selama penulis kuliah.
10. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perikatan selama penulis kuliah.
11. Bapak Radius, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Advokasi dan Mediasi selama penulis kuliah.

12. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal penulisan karya ilmiah selama penulis kuliah.
13. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum *Cyber Crime* selama penulis kuliah.
14. Bapak Daria, S.Sy., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Tata Negara dan Metode Penelitian Hukum selama penulis kuliah.
15. Para dosen dan staf Universitas Putera Batam.
16. Bapak Andi Kusuma, S.H., M.Kn. yang telah banyak memberikan kontribusi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi penulis.
17. Dhenis A Depari, Beni Berando Girsang, Harveno, dan Iryanto yang telah banyak memberikan kontribusi saran teknis penulisan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi.
18. Seluruh rekan-rekan mahasiswa jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis.
19. Bapak Yanto Tanadi dan ibu Herawati, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan semangat.
20. Istri teristimewa, Harina yang selalu mendampingi, selalu menyiapkan fasilitas, dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi.

21. Adik kandung, Fenny dan Yofandi yang selalu mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi.

22. Anak-anak tersayang, Sebastian Tan, Alexandria Tandiani, dan Natalie Bertrand Tandiani yang selalu mendoakan kelancaran penulis hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang penulis sebutkan, besar harapan skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermamfaat bagi penulis khususnya dan bermamfaat bagi pembaca secara umumnya. Bagi pihak yang telah membantu penulisan ini, semoga amal dan kebaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Batam, 6 Pebruari 2019

Penulis

Erwin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	14
1.3.Pembatasan Masalah	14
1.4.Perumusan Masalah	14
1.5.Tujuan Penelitian	15
1.6.Manfaat Penelitian	15
1.6.1. Manfaat Praktis	15
1.6.2. Manfaat Teoritis	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori.....	17
2.1.1. Pemahaman Peranan Suatu Ideologi Secara Umum	17
2.1.2. Pemahaman Ideologi Pancasila Di Indonesia	25
2.1.3. Teori Kemanfaatan (<i>Utilitarianism Theory</i>)	42
2.1.4. Teori Hukum Pembangunan.....	44
2.2. KerangkaYuridis	48
2.2.1. Pengaturan Terhadap Ideologi Pancasila Secara Umum.....	48
2.2.2. Pengaturan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	55
3.2. Metode Pengumpul Data.....	57

3.2.1. Jenis Data	57
3.2.2. AlatPengumpul Data	58
3.3. Metode Analisis Data	58
3.4. Penelitian Terdahulu	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	68
4.1.1. Pelaksanaan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat Di Indonesia.....	68
4.1.2.Upaya Pengawasan Ideologi Pancasila Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	80
4.1.3. Peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	86
4.2. Pembahasan	93
4.2.1. Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi kemasyarakatan	93
4.2.2. Upaya Pengawasan Pemerintah Dalam Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia.....	96

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan.....	100
5.2. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian